



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT KERJA : ASISTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERRU SETIADHIE
2. Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI
3. NHK : 52672

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.074.888.400

1. Tanah Seluas 500 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 637.000.000
2. Tanah Seluas 431 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 549.090.400
3. Tanah dan Bangunan Seluas 527 m2/140 m2 di KOTA SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 888.798.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 636.500.000

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA SEDAN Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 388.000.000
3. MOTOR, HONDA MOTOR BEBEK Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 23.500.000
4. MOBIL, ERTIGA MINI BUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 90.050.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 634.830.090**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 3.436.268.490

III. HUTANG Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.436.268.490

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.